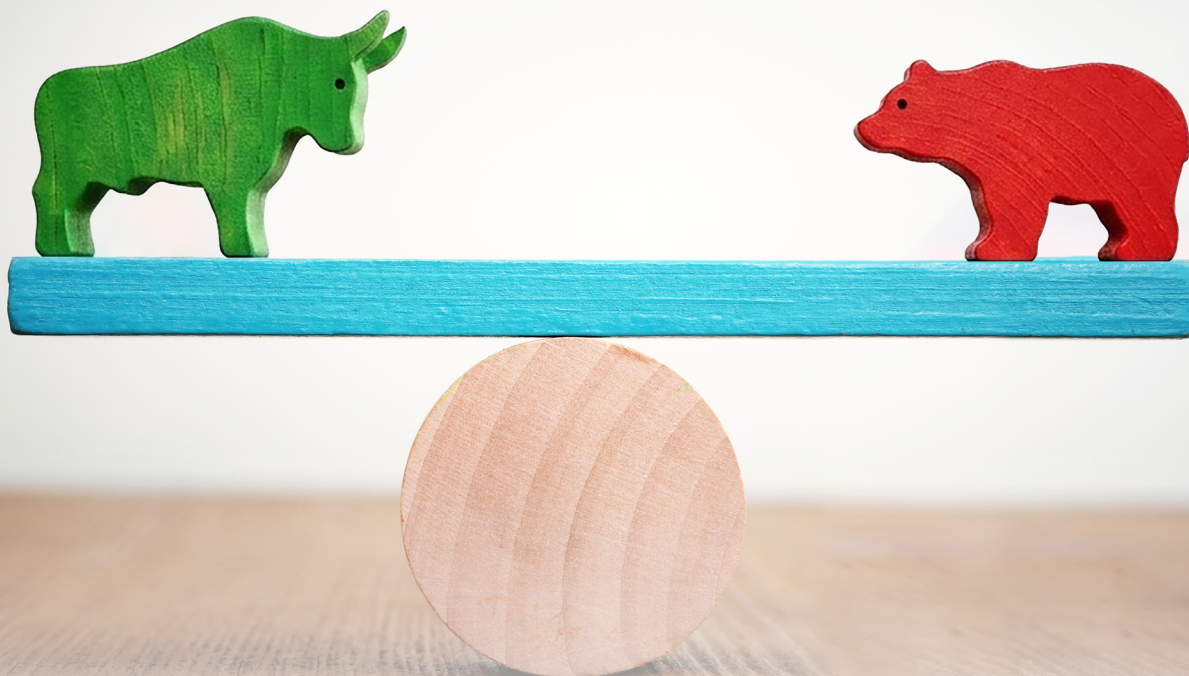


Menjaga Stabilitas di Tengah Volatilitas

KPEI Optimalkan Pengelolaan Risiko Pasar



Indeks



2 Menjaga Stabilitas Di Tengah Volatilitas: KPEI Optimalkan Pengelolaan Risiko Pasar

5 Mengenal Jenis Keanggotaan KPEI dalam Layanan Pasar Modal, Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

7 Perkuat Ketahanan Digital, KPEI Dukung Mitigasi Risiko Siber melalui NIST Cybersecurity Workshop bagi Anggota Kliring

8 Digitalisasi Penawaran Obligasi: Peran Strategis KPEI dalam Implementasi E-IPO EBUS

10 KPEI Raih Penghargaan Internasional LACP Vision Awards dan ASSRAT 2025

11 Statistik

13 Event Highlight

MENJAGA STABILITAS DI TENGAH VOLATILITAS: KPEI Optimalkan Pengelolaan Risiko Pasar

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas pasar modal Indonesia di tengah meningkatnya volatilitas.

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas pasar modal Tanah Air di tengah meningkatnya volatilitas.

Dinamika geopolitik, fluktuasi ekonomi dunia, hingga sentimen negatif dari lembaga pemeringkat kerap memicu gejolak pasar, yang pada dasarnya mencerminkan interaksi alami dan keterhubungan pasar domestik dengan kondisi global. Dalam konteks ini, KPEI telah memiliki sistem yang solid dan mumpuni untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga kliring.

Kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) sepanjang kuartal I/2026 terkoreksi

18,49% menjadi 7.048,22. Hal itu sejalan dengan aksi jual investor asing dengan *net sell* Rp32,85 triliun secara *year-to-date* (YtD).

Sejumlah analis sekuritas menyebutkan dampak geopolitik dari perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran menyebabkan harga minyak melonjak. Hal itu membuat risiko inflasi global meningkat, yang membuat pelaku pasar menghindari aset berisiko seperti saham.

Raja Nobriansyah, Kepala Unit Analisa Risiko Bisnis KPEI, menjelaskan bahwa tekanan yang terjadi saat ini, termasuk koreksi signifikan IHSG, tidak datang secara tiba-tiba. Skenario atas kondisi tersebut telah diantisipasi sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko yang menjadi

fokus utama pengelolaan risiko KPEI sebagai lembaga infrastruktur pasar modal.

"Volatilitas ini adalah refleksi pasar. Bukan sesuatu yang diharapkan, tetapi juga bukan hal yang tidak diperkirakan. Justru fungsi kami, KPEI, adalah mengantisipasi kondisi seperti ini," ujarnya.

Menurutnya, gejolak pasar saat ini tecermin dari meningkatnya aktivitas transaksi, lonjakan volume perdagangan, serta fluktuasi harga yang cukup tajam. Koreksi IHSG bahkan menjadi salah indikator yang paling diperhatikan, mengingat posisinya sebagai barometer utama kondisi ekonomi nasional.

Raja menjelaskan bahwa infrastruktur KPEI tetap mampu menopang seluruh



Editorial

Memasuki 2026, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas pasar di tengah volatilitas yang kian dinamis. Perkembangan pasar keuangan yang semakin kompleks menuntut sistem kliring dan penjaminan yang adaptif, andal, serta berbasis manajemen risiko yang kuat.

IDClear News edisi kali ini mengangkat peran strategis KPEI dalam mengelola risiko pasar, sekaligus menyoroti penguatan ekosistem melalui inovasi layanan lintas

pasar, mulai dari pasar modal hingga pasar uang, dan pasar valuta asing. Di sisi lain, akselerasi digitalisasi terus menjadi fokus, termasuk dalam pengembangan E-IPO EBUS dan penguatan ketahanan siber bagi anggota kliring.

Berbagai indikator kinerja hingga Maret 2026 menunjukkan konsistensi KPEI dalam menjaga efisiensi penyelesaian transaksi, memperkuat sistem agunan, serta mengembangkan instrumen seperti repo dan pinjam meminjam efek. Hal ini menjadi fondasi

penting dalam menjaga kepercayaan pelaku pasar.

Di tengah fluktuasi global dan domestik, kolaborasi dan inovasi akan tetap menjadi kunci pengembangan pasar keuangan di Tanah Air. Dengan infrastruktur yang semakin solid, KPEI optimistis dapat terus mendukung pertumbuhan pasar keuangan Indonesia yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Salam Semangat,
Redaksi IDClear News

- ◆ **KPEI memanfaatkan kondisi volatilitas untuk melakukan penilaian secara komprehensif kinerja sistem dan kerangka manajemen risiko.**
- ◆ **Kolaborasi KPEI dengan pelaku industri, khususnya Anggota Kliring/Anggota Bursa dan Perusahaan Efek, menjadi kunci dalam penerapan manajemen risiko yang disiplin dan konsisten.**
- ◆ **Dalam menangani kasus gagal bayar, KPEI mengacu pada ketentuan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.**

aktivitas perdagangan meskipun sempat terjadi tekanan likuiditas dan pergeseran perilaku investor di tengah gejolak pasar.

Di tengah lonjakan transaksi saham, infrastruktur KPEI terbukti mumpuni. Rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) pada kuartal I/2026 mencapai Rp27,46 triliun, meningkat tajam dari RNTH pada 2025 sebesar Rp18,06 triliun, dan Rp12,85 triliun pada 2024.

Di tengah fluktuasi pasar, KPEI melakukan kalibrasi ulang margin secara cermat, agar tidak memberatkan Perusahaan Efek atau Anggota Kliring. Namun di sisi lain, margin juga tidak dapat dilonggarkan secara berlebihan, mengingat fungsi utama KPEI sebagai lembaga kliring penjaminan untuk memastikan stabilitas dan keberlangsungan penyelesaian transaksi di Pasar Modal.

Margin adalah sejumlah agunan yang wajib disetor oleh anggota kliring kepada KPEI untuk menutupi risiko atas posisi transaksi yang belum diselesaikan, sekaligus menjamin terpenuhinya kewajiban penyelesaian transaksi bursa.

Dalam mengantisipasi volatilitas, sambung Raja, KPEI secara berkala melakukan *backtesting* sebagai bagian dari evaluasi model risiko yang digunakan. *Backtesting* adalah metode statistik yang memverifikasi kerugian

aktual dibandingkan dengan kerugian yang sebelumnya diprediksi atau diproyeksikan melalui perhitungan initial margin (*potential future exposures*). *Back test* digunakan untuk mengukur akurasi perhitungan *initial margin* yang dihitung berdasarkan data historis, seperti model pengukuran risiko *Historical Simulation Value at Risk* (HSVaR), *Alternate HSVaR*, dan *Standardized Portfolio Analysis of Risk* (SPAN).

KPEI turut menjalankan *stress testing*, yakni pengujian terhadap ketahanan finansial dan kecukupan sumber daya keuangan dalam menghadapi skenario pasar ekstrem.

Raja menjelaskan, KPEI memanfaatkan kondisi volatilitas ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh atas efektivitas sistem dan kerangka manajemen risiko yang ada. Seluruh perangkat, mulai dari regulasi, parameter pengukuran, hingga pemantauan transaksi, terus dievaluasi dan disempurnakan untuk memastikan kesiapan KPEI menghadapi potensi krisis.

Dalam praktiknya, KPEI lebih mengedepankan pengukuran risiko berbasis data historis dan parameter kuantitatif. Salah satu metode utama yang digunakan adalah *Value at Risk* (VaR), yakni pendekatan statistik yang mengukur potensi kerugian maksimum atas suatu posisi atau portofolio pada tingkat kepercayaan dan periode waktu tertentu. Dengan metode ini, KPEI dapat mengestimasi eksposur risiko secara lebih terukur, baik pada level portofolio anggota kliring maupun secara agregat di pasar modal.

"Kami lebih fokus pada pengukuran potensi risiko secara menyeluruh. Tidak

Penerbit:
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Penasihat:
Direksi

Penanggung Jawab:
Sekretaris Perusahaan

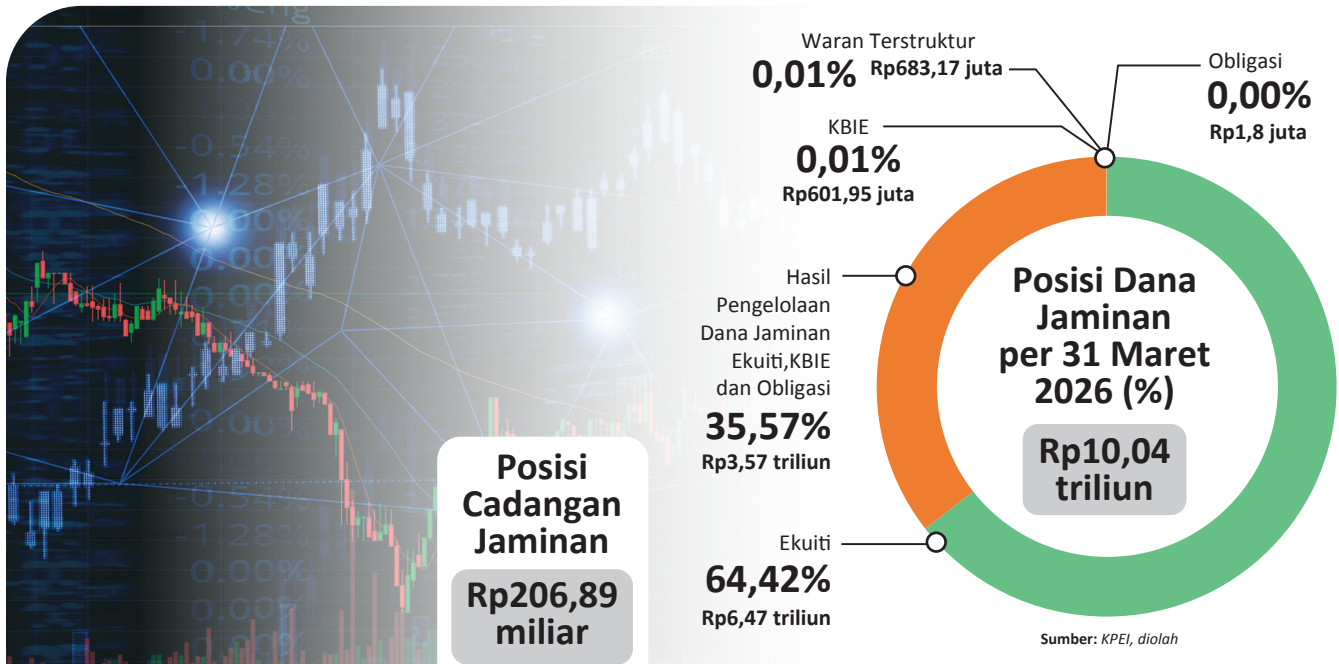
Dewan Redaksi:
Lisda Rumondang Sitohang, Caroline Claudia Christy, Mohamad Farhan Fawwaz, dan Marcellino Candra Wijaya

Alamat Redaksi & Sirkulasi:
Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I Lt. 5
Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

customer.care@idclear.co.id
(021)-515-5125; (021)-515-5115

www.idclear.co.id





“

Dengan penerapan manajemen risiko yang komprehensif, KPEI optimis pasar modal Indonesia mampu melewati periode volatilitas ini. Evaluasi berkelanjutan atas kerangka manajemen risiko yang ada diyakini akan semakin memperkuat ketahanan dan stabilitas pasar modal Indonesia dalam jangka panjang.

hanya per emiten atau investor, tetapi juga secara sistemik di pasar modal,” papar Raja.

Pendekatan ini memungkinkan KPEI untuk memantau eksposur risiko dari berbagai pihak, termasuk perusahaan efek dan kualitas agunan efek yang di, sekaligus memastikan bahwa kecukupan sumber daya keuangan KPEI tetap terjaga dalam menghadapi lonjakan aktivitas pasar.

Selain itu, KPEI juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pelaku industri, khususnya antara Lembaga Kliring

dan Penjaminan (LKP) dengan perusahaan sekuritas dalam menerapkan manajemen risiko yang disiplin dan konsisten. Setiap pihak diharapkan menyesuaikan kebijakan pengelolaan risikonya sesuai dengan profil risiko dan kapasitas keuangan masing-masing.

Dengan penerapan manajemen risiko yang komprehensif, KPEI optimis pasar modal Indonesia mampu melewati periode volatilitas ini. Evaluasi berkelanjutan atas kerangka manajemen risiko yang ada diyakini akan semakin memperkuat ketahanan dan stabilitas pasar modal Indonesia dalam jangka panjang.

Ke depan, KPEI juga membuka ruang untuk penyempurnaan kebijakan berbasis data terbaru, termasuk statistik pasar dan posisi cadangan jaminan, yang akan menjadi bagian dari publikasi berkala. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia, khususnya di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut.

LANGKAH PENANGANAN

KPEI juga mengungkapkan langkah-langkah penanganan apabila terjadi kasus gagal bayar.

Kepala Unit Penjaminan dan Pengelolaan Agunan KPEI Salman Faeroez menjelaskan, penanganan gagal penyelesaian transaksi mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peraturan No.26/POJK.04/2014

tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. Dalam regulasi tersebut, terdapat tahapan penyelesaian kewajiban melalui mekanisme *default waterfall*.

“Jika terjadi kegagalan dari anggota kliring, langkah pertama adalah menggunakan agunan yang tersedia. Jika mencukupi, kewajiban langsung diselesaikan dari dana tersebut,” ujarnya.

Apabila agunan tidak mencukupi, KPEI akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni penggunaan cadangan jaminan yang berasal dari penyisihan laba lembaga. Selanjutnya, jika masih belum memadai, digunakan dana jaminan yang dihimpun dari kontribusi anggota kliring berdasarkan aktivitas transaksi.

Dalam kondisi ekstrem, skema berlanjut ke mekanisme *loss sharing* antaranggota kliring atau jaringan kredit, dengan prinsip tanggung renteng. Meski demikian, kewajiban utama tetap melekat pada anggota kliring yang mengalami gagal bayar. Skema ini memastikan bahwa penyelesaian transaksi tetap berjalan dan stabilitas pasar tetap terjaga.

Salman mengungkapkan, peningkatan nilai transaksi anggota kliring turut menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan eksposur risiko. Oleh karena itu, KPEI secara berkala meninjau komposisi agunan, terutama mendorong penggunaan aset likuid seperti kas.

“Ketika volume transaksi meningkat signifikan, kami melakukan *review* terhadap kecukupan dana minimum dan komposisi agunan anggota kliring,” katanya.

Mengenal Jenis Keanggotaan KPEI dalam Layanan Pasar Modal, Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Peran strategis PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yang makin luas ke Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) turut mendorong hadirnya inovasi dalam pengembangan keanggotaan sebagai upaya untuk menjamin penyelesaian transaksi dan meminimalkan risiko terjadinya gagal bayar.

KPEI memegang peran kunci dalam menjaga stabilitas di pasar keuangan Indonesia. Sejak 30 September 2024, KPEI resmi menjalankan peran baru sebagai *Central Counterparty* (CCP) Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI).

Seiring dengan perluasan peran strategis KPEI, terdapat beberapa jenis keanggotaan yang berlaku saat ini. Sebagai gambaran umum, saat ini Anggota KPEI adalah anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) atau pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa seperti yang diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian transaksi Bursa.

Secara garis besar, kategori keanggotaan KPEI terbagi menjadi dua yakni keanggotaan di Pasar Modal dan keanggotaan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA). Kedua kategori tersebut memiliki jenis keanggotaan yang berbeda berdasarkan segmen pasar yang dilayani.

Kepala Divisi Keanggotaan dan Pengembangan Pasar KPEI Listyarini Hikmaningrum menjelaskan bahwa keanggotaan di Pasar Modal yaitu Perusahaan Efek yang biasa disebut Anggota Bursa (AB) BEI masih mendominasi jumlah keanggotaan KPEI yang terdaftar saat ini. Jumlah Anggota Bursa saat ini sama dengan jumlah Anggota Kliring.

Listyarini memaparkan, saat ini terdapat dua jenis keanggotaan di Pasar Modal berdasarkan peraturan yakni Anggota Kliring Umum (AKU) dan Anggota Kliring



Individual (AKI). Dalam skema AKI, Anggota Kliring bertransaksi untuk kepentingan sendiri dan nasabahnya.

Definisi AKI berdasarkan Peraturan II.3 adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, sedangkan dalam AKU, definisi berdasarkan peraturan adalah Perusahaan Efek, Bank Umum atau pihak lain yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan

jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

AKU bertransaksi untuk kepentingan sendiri dan nasabah termasuk *Trading Member* yang menjadi nasabah AKU. Kendati demikian, dia menyatakan, skema AKU di pasar modal saat ini belum ada yang menggunakan.

Selanjutnya, keanggotaan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing juga terdiri atas AKU dan AKI, bedanya AKI hanya bisa bertransaksi untuk kepentingan sendiri sementara AKU dapat mengakomodir



kepentingan sendiri dan nasabahnya. Peserta atau anggota utama dari jenis keanggotaan ini adalah perbankan.

Anggota Kliring KPEI, paparnya, baik di Pasar Modal maupun Pasar Uang Valuta Asing akan memperoleh penjaminan atas transaksi yang dikliringkan dan diselesaikan melalui KPEI. Keuntungan ini tidak didapatkan bagi yang belum menjadi Anggota Kliring KPEI.

PERLINDUNGAN INVESTOR

Fungsi Penjaminan yang dilakukan KPEI juga sejalan dengan perlindungan investor. KPEI memberikan kepastian dalam hal penyelesaian transaksi hingga mitigasi risiko gagal bayar. "Dengan dijamin oleh KPEI sebagai CCP, transaksi menjadi lebih aman," tambahnya.

Bagi perbankan yang menjadi anggota KPEI untuk Pasar Uang Valuta Asing mendapat beberapa keuntungan atau benefit yang dapat dinikmati. Salah satunya berupa penyediaan *capital requirement* atas eksposur transaksi yang dilakukan melalui KPEI berada di kisaran 2% hingga 4% atau lebih rendah dari skema transaksi secara bilateral (tidak dilakukan melalui KPEI).

Sementara itu, untuk menjadi anggota KPEI, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Untuk jenis anggota Pasar Modal salah satunya terdapat kontribusi dana jaminan awal sebesar Rp5 miliar yang bersifat *non-refundable* yang harus dibayarkan oleh Anggota Kliring.

Sedangkan, anggota Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing harus memenuhi persyaratan penyerahan *default fund contribution* (DFC) awal yang bersifat *refundable* dengan nominal yang sama sebesar Rp5 miliar.

Lebih lanjut, Kepala Unit Keanggotaan KPEI Diah Sugiretno menjelaskan bahwa terjadi pertumbuhan keanggotaan signifikan khususnya untuk jenis pasar uang dan pasar valuta asing. Saat implementasi, terdapat delapan anggota *perbankan sebagai pilot project*, kini peserta telah bertambah menjadi 11 anggota. "Saat ini sedang proses dua calon bank untuk menjadi Anggota CCP KPEI," ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pasar, KPEI senantiasa memastikan keseimbangan antara hak-hak yang diterima dengan pemenuhan kewajiban tiap-tiap kategori anggota sebagai bentuk kepatuhan. Seluruh hak dan kewajiban telah tercantum dalam ketentuan yang dibuat oleh KPEI.

"Kami senantiasa melakukan monitoring secara berkala apakah anggota telah mendapatkan pemenuhan hak-haknya dan KPEI telah menindaklanjutinya serta memastikan anggota memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan," jelas Diah.

KPEI juga telah menyiapkan pengembangan lainnya untuk keanggotaan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing seperti mekanisme AKU dan implementasi layanan *non-centrally cleared derivatives* (NCCD) yang rencananya diimplementasikan



Para anggota KPEI, baik di pasar modal maupun pasar uang akan memperoleh penjaminan dari KPEI. Keuntungan ini tidak didapatkan bagi partisipan atau di luar anggota KPEI.

di tahun 2026, hingga *CCP repo* yang diperkirakan akan dimulai pada 2028. Selain itu, pengembangan lain di pasar modal yakni perluasan keanggotaan layanan pinjam meminjam efek (PME) dengan keterlibatan manajer investasi.

KPEI menyatakan kesiapan untuk terus beradaptasi terhadap produk-produk baru seperti aset digital seperti mata uang kripto. Perluasan partisipan turut dibidik ke pasar potensial seperti institusi di luar lembaga jasa keuangan.

Beragam terobosan itu disiapkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran KPEI dalam meningkatkan likuiditas di pasar modal Indonesia. Strategi ini diyakini turut memperdalam pasar keuangan di Tanah Air.

Perkuat Ketahanan Digital, KPEI Dukung Mitigasi Risiko Siber melalui NIST *Cybersecurity Workshop* bagi Anggota Kliring

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) menegaskan komitmen memperkuat ketahanan digital secara berkelanjutan di industri pasar modal Indonesia dari ancaman serangan siber.

Ancaman serangan siber menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan tidak terkecuali pasar modal serta industri keuangan secara umum. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan terjadi 3,64 miliar serangan siber atau anomali trafik di Indonesia pada rentang Januari hingga Juli 2025.

BSSN menyebut jumlah serangan siber sepanjang periode itu menyamai total anomali dalam 5 tahun terakhir. Secara terperinci, sebanyak 83,68% dari serangan siber itu berbasis *malware* kemudian sisanya 4,32% berupa *unauthorized access* dan serangan terhadap sistem serta 0,64% berbentuk eksploitasi sistem.

Dalam konteks operasional pasar modal, risiko serangan siber dapat dilihat dari dua sisi yakni KPEI selaku penyelenggara kliring dan penjaminan serta Anggota Kliring (AK) sebagai pengguna jasa KPEI. Serangan siber terhadap keduanya sama-sama memunculkan risiko kerugian.

Sebagai gambaran, risiko operasional yang muncul dari serangan siber yakni terganggunya proses transaksi di AK. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian bagi AK karena pendapatan mereka berisiko terkikis selama gangguan terjadi.

Kepala Divisi Operasional Teknologi Informasi KPEI Galuh Dian Maulana menjelaskan, terdapat lima risiko yang melekat dalam serangan siber yang mencakup operasional, finansial, kepatuhan, hukum, dan reputasi.

"Dilihat secara umum ada lima risiko itu, tinggal dilihat dari sisi mana" jelasnya.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan pemahaman AK terhadap risiko siber dan upaya mitigasi, KPEI menyelenggarakan *workshop* tentang NIST *Cybersecurity Framework 2.0*. Kegiatan ini digelar sebagai



langkah memperkuat tata kelola dan manajemen risiko keamanan siber seiring dengan meningkatnya berbagai insiden siber yang terjadi.

NIST *Cybersecurity Framework* (CSF) merupakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) Amerika Serikat. *Framework* ini menjadi salah satu acuan global dalam pengelolaan risiko siber.

NIST CSF didesain untuk membantu organisasi memahami, mengelola, dan mengurangi risiko keamanan informasi secara sistematis. Implementasi *framework* ini relevan bagi KPEI karena memberikan struktur yang jelas dan fleksibel yang turut mencakup aspek proses, teknologi, dan sumber daya manusia.

Workshop NIST CSF 2.0 diselenggarakan untuk merespons dinamika risiko siber yang makin meningkat. Agenda ini tidak hanya diposisikan sebagai kegiatan teknis tetapi juga bagian dari strategi dan pendampingan KPEI kepada AK.

Kepala Unit Keanggotaan KPEI Diah Sugiretno mengungkapkan terjadi banyak insiden terkait serangan siber di AK pada 2025. Serangan tersebut ada

yang berdampak kepada *Self-Regulatory Organization* (SRO) maupun hanya ke internal AK yang bersangkutan.

Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa risiko serangan siber tidak hanya berdampak pada institusi yang terkena serangan dalam hal ini AK. Akan tetapi, efeknya dapat meluas ke ekosistem pasar modal.

"Intinya ada yang terjadi di internalnya mereka bahkan ke nasabahnya. Ada juga yang kejadiannya itu di mereka berdampak ke SRO," jelasnya.

Melalui *workshop* NIST CSF 2.0, KPEI tidak hanya ingin meningkatkan kesadaran AK terhadap ancaman risiko serangan siber tetapi juga dapat bermanfaat secara riil bagi AK. Kegiatan ini diharapkan melahirkan sebuah perubahan dan tidak berhenti pada kegiatan *workshop* saja.

KPEI secara berkesinambungan terus memastikan seluruh ekosistem terkait pasar modal Indonesia memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi serangan siber dan memperkuat ketahanan digital secara umum. Tujuan ini dapat dicapai tidak hanya bergantung pada sistem tetapi pemahaman dan aksi dari seluruh pemangku kepentingan.

DIGITALISASI PENAWARAN OBLIGASI:

Peran Strategis KPEI dalam Implementasi E-IPO EBUS

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) memperkuat peran strategis dalam mendukung implementasi penawaran umum elektronik untuk efek bersifat utang dan sukuk (E-IPO EBUS)



Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong digitalisasi pasar modal Indonesia yang lebih transparan, efisien, dan terintegrasi. Penerapan sistem E-IPO EBUS diharapkan memperluas akses investor terhadap instrumen surat utang.

Kepala Unit Surat Utang dan Derivatif KPEI, M. Yusron, menjelaskan bahwa pengembangan E-IPO EBUS merupakan kelanjutan dari implementasi sistem penawaran umum elektronik untuk saham yang telah lebih dulu berjalan.

Inisiatif ini juga sejalan dengan kerangka regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya POJK No.41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Regulasi itu mengatur penawaran umum

secara elektronik, baik untuk efek bersifat ekuitas maupun utang.

Meski demikian, Yusron menuturkan bahwa pengaturan teknis untuk masing-masing instrumen memiliki tahapan pengembangan tersendiri. Untuk saham, implementasi lebih dahulu diperkuat melalui ketentuan turunan berupa SEOJK, sementara itu untuk efek bersifat utang dan sukuk masih dalam tahap penyusunan.

"Pengembangan E-IPO EBUS ini merupakan tahap lanjutan dari sistem E-IPO saham yang sudah berjalan. Secara regulasi, dasar utamanya sudah ada, namun implementasinya dilakukan bertahap," ujarnya.

Dalam ekosistem E-IPO EBUS, peran KPEI dinilai krusial, khususnya dalam proses validasi dana pemodal dan distribusi efek kepada pemodal. Melalui sistemnya,

KPEI melakukan verifikasi bahwa dana yang ditempatkan investor sesuai dengan pesanan yang diajukan dalam proses penawaran.

Yusron menjelaskan, setiap dana yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum dialokasikan. Proses ini bertujuan untuk menjaga integritas transaksi serta meminimalkan risiko *mismatch* antara pesanan dan ketersediaan dana.

"Kami melakukan validasi terhadap dana pemodal untuk memastikan kesesuaian dengan pesanan. Ini penting agar proses penjatahan dapat berjalan dengan baik dan akurat," jelasnya.

Setelah proses penjatahan selesai dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), KPEI kemudian berperan dalam mendistribusikan efek kepada pemodal. Distribusi dilakukan langsung ke rekening

“

Digitalisasi melalui E-IPO juga dinilai dapat memperluas akses investor, termasuk investor asing, karena seluruh proses dilakukan secara daring. Dengan sistem yang terintegrasi, investor dapat mengikuti penawaran secara lebih mudah tanpa terbatas oleh lokasi geografis.

efek masing-masing pemodal, sehingga memastikan penyelesaian transaksi berjalan efisien dan tepat waktu.

Distribusi tersebut umumnya dilakukan menjelang tanggal pencatatan (*listing*), yakni sekitar satu hari sebelum efek mulai diperdagangkan di pasar sekunder. Dengan demikian, investor telah menerima kepemilikan efek

sebelum instrumen tersebut resmi diperdagangkan.

“Peran distribusi ini menjadi titik penting karena memastikan setiap investor menerima efek sesuai dengan hasil penjatahan,” ujar Yusron.

KESIAPAN SISTEM

Secara historis, realisasi nilai penawaran EBUS relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai penawaran Efek Bersifat Ekuitas. Oleh karena itu, KPEI dan *self regulatory organization* (SRO) harus menyiapkan sistem yang mumpuni untuk menampung kombinasi volume transaksi tersebut.

Pada 2025, realisasi EBUS mencapai Rp212,43 triliun, yang mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Di sisi lain, realisasi penerbitan IPO hanya mencapai Rp14,41 triliun.

Semarak penerbitan obligasi kembali berlanjut pada 2026. Mengutip data OJK per Maret 2026, realisasi EBUS mencapai Rp51,65 triliun, sedangkan IPO baru sejumlah Rp302,40 miliar.

Seiring dengan potensi nilai transaksi obligasi yang umumnya lebih besar dibandingkan penawaran saham, kesiapan infrastruktur menjadi perhatian utama. Menanggapi hal tersebut, Yusron memastikan bahwa sistem yang dimiliki KPEI mampu menjaga kestabilan pemrosesan data serta mengantisipasi

peningkatan volume transaksi pada masa yang akan datang.

Menurutnya, kapasitas sistem saat ini sudah memadai, tetapi KPEI tetap melakukan pengembangan lanjutan untuk meningkatkan daya tampung dan keandalan infrastruktur. Hal ini penting mengingat karakteristik pasar obligasi yang memiliki nilai emisi relatif besar dan melibatkan investor institusi maupun ritel.

“Sistem yang kami miliki saat ini sudah cukup *advance* dan mampu mengakomodasi kebutuhan E-IPO EBUS. Namun demikian, pengembangan infrastruktur tetap kami lakukan untuk memastikan kesiapan ke depan,” katanya.

Digitalisasi melalui E-IPO juga dinilai dapat memperluas akses investor, termasuk investor asing, karena seluruh proses dilakukan secara daring. Dengan sistem yang terintegrasi, investor dapat mengikuti penawaran secara lebih mudah tanpa terbatas oleh lokasi geografis dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Terkait implementasi E-IPO EBUS, KPEI menargetkan sistem dapat mulai beroperasi dalam waktu dekat. Yusron mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih berdiskusi dengan OJK untuk memastikan seluruh aspek regulasi dan operasional telah siap sebelum sistem diluncurkan secara resmi.

“Dari sisi internal, kami menargetkan sistem dapat *live* tahun ini. Namun, untuk waktu pastinya, kami masih menunggu arahan dan pengumuman resmi dari OJK,” ujarnya.

Koordinasi dengan regulator menjadi langkah penting untuk memastikan implementasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar.

KPEI menilai digitalisasi tidak hanya meningkatkan kemudahan akses, tetapi juga memperkuat pengawasan dan akurasi data transaksi. Hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pasar modal yang modern, sekaligus memperkuat perlindungan bagi investor.

Ke depan, KPEI akan terus memperkuat peran KPEI dalam mendukung inovasi produk dan infrastruktur pasar, sejalan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

“Dengan sistem yang terintegrasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami optimis implementasi E-IPO EBUS dapat berjalan optimal dan memberikan nilai tambah bagi pasar modal Indonesia,” tutur Yusron.



KPEI Raih Penghargaan Internasional LACP Vision Awards dan ASSRAT 2025

/// **Komitmen PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta praktik berkelanjutan mendapatkan pengakuan internasional dengan meraih penghargaan dari Internasional National Center for Corporate Reporting (NCCR) dan League of American Communications Professionals (LACP).**

Dalam ajang LACP Vision Awards 2024/2025, Laporan Tahunan (*Annual Report*) 2024 KPEI mencatatkan prestasi dengan menduduki posisi peringkat ke-8 terbaik di dunia dalam kategori *Top 100 Reports Worldwide*. Pada periode tahun buku yang sama, KPEI juga meraih Platinum Winner untuk kategori Financial - Capital Market atas keunggulan kualitas penyajian dan komunikasi laporan pada ajang LACP Vision Awards 2024/2025. Prestasi terbaru ini meningkat dari sebelumnya setelah KPEI memperoleh penghargaan di tingkat Asia-Pasifik pada 2023.

LACP Vision Award sendiri merupakan ajang kompetisi laporan tahunan berskala internasional yang diikuti berbagai perusahaan dunia dengan latar belakang industri beragam. LACP merupakan institusi independen berbasis di Amerika Serikat yang menilai laporan tahunan berdasarkan aspek desain, kejelasan narasi, serta aksesibilitas informasi yang telah berdiri sejak 2001.

Penghargaan yang diterima dari LACP menjadi pelengkap bagi KPEI yang juga mendapatkan Gold Rating dalam The 21st Asia Sustainability Reporting Rating (ASSRAT) 2025. NCCR menggelar program ini untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas laporan keberlanjutan di kawasan Asia.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kepatuhan IDClear dalam mengimplementasikan GRI Standards 2021 dan SE OJK 16/2021. Penilaian ASSRAT menitikberatkan pada transparansi pengungkapan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG), serta sejauh mana perusahaan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

LACP Vision Awards 2024/2025 dan Gold Rating dalam The 21st Asia Sustainability Reporting Rating (ASSRAT) 2025 turut meningkatkan kepercayaan

investor kepada KPEI sebagai *Self Regulatory Organization* Pasar Modal. Penghargaan dari institusi internasional itu turut memperkuat posisi pasar modal Indonesia di pasar global.

Penghargaan skala internasional yang diperoleh KPEI menjadi bukti bahwa perusahaan tidak hanya menjalankan tugas sebagai lembaga kliring yang menjamin transaksi efek, tetapi juga secara konsisten mengedepankan aspek keberlanjutan dalam ekosistem pasar modal yang lebih transparan, tangguh, dan bertanggung jawab.

Keberhasilan KPEI dalam menyajikan laporan yang transparan dan kredibel turut memperkuat citra pasar modal Indonesia sebagai ekosistem investasi yang tangguh, bertanggung jawab, dan setara dengan standar dunia. Lebih lanjut, KPEI menegaskan, penyampaian kinerja perusahaan akan dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan relevan dengan kepentingan pemangku kepentingan.

KUIS IDCLEAR

Lengkapi kepanjangan dari setiap jawaban atas petunjuk pertanyaan berikut:

- 1** Dua peran penting KPEI dalam ekosistem E-IPO efek bersifat utang sukuk (E BUS) kepada pemodal. (V _ _ _ D _ _ _ D _ N _) dan (D _ _ T _ _ _ _ E F _ _)
- 2** Seiring dengan meningkatnya ancaman insiden siber, berikut ini dua langkah utama yang terus diperkuat KPEI untuk memastikan keamanan siber dari penyelenggaraan workshop tentang NIST Cybersecurity Framework 2.0. (T _ T _ K _ _ O _ _) dan (M _ T _ _ _ _ R _ _ _ K _)
- 3** Dua jenis keanggotaan di Pasar Modal berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu (AN _ _ _ _ KL _ _ _ _ U _ U _) dan (A _ G _ _ _ K _ _ R _ _ _ IN _ _ _ _ _)
- 4** Dua jenis pengujian dalam mengantisipasi volatilitas dan skenario pasar yang ekstrem yang dilakukan KPEI secara berkala yaitu (B _ CKT _ _ _ _) dan (S _ _ _ SS T _ _ T _ _)

Silakan jawab pertanyaan KUIS IDClear ini melalui Instagram @id_clear pada postingan *IDClear News Edisi 1 2026* (pinned post), dengan format; Jawaban KUIS. Diikuti dengan kepanjangan kata yang berhasil ditemukan secara berurutan.

Jangan lupa, ajak dan mention 3 orang teman sebagai syaratnya. Cek *IDClear News* Edisi 1-2026, untuk membantu menemukan jawabannya. Jawaban selambatnya diterima pada 31 Mei 2026. Dapatkan hadiah menarik dari *IDClear* untuk 5 orang yang beruntung.

PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

	Penyelesaian Transaksi Bursa		Efisiensi	
	Volume	Nilai	Volume (%)	Nilai (%)
Total 2025	697.973.122.700	437.629.825.186.800	73,10	67,26
Tertinggi Harian	20.651.882.000	17.426.434.548.900	78,03	74,21
Rata-rata Harian	12.690.420.413	7.956.905.912.487	72,12	66,20
Terendah harian	6.332.821.300	4.571.428.454.700	63,50	56,14

Data sampai dengan 31 Maret 2026

FASILITAS INTRADAY

Penggunaan (Rp)		Biaya (Rp)
133.227.896.094.915	Total Penggunaan	1.329.165.953
44.409.298.698.305	Rata-rata Bulanan	443.055.317
2.422.325.383.543	Rata-rata Harian	24.166.653

Data sampai dengan 31 Maret 2026

TRANSAKSI TPA REPO SBN

	Total	
	Nilai	Volume
Januari	48.463.300.000	50.000.000.000
Februari	-	-
Maret	-	-
April	-	-
Mei	-	-
Juni	-	-
Juli	-	-
Agustus	-	-
September	-	-
Oktober	-	-
November	-	-
Desember	-	-
Total	48.463.300.000	50.000.000.000

Data sampai dengan 31 Maret 2026

TRANSAKSI BURSA

	Frekuensi (kali)	Volume (lembar)	Nilai (Rp)
Total 2026	165.620.109	2.804.756.687.879	1.515.421.959.794.920
Rata-rata Harian 2026	3.011.275	50.995.576.143	27.553.126.541.726

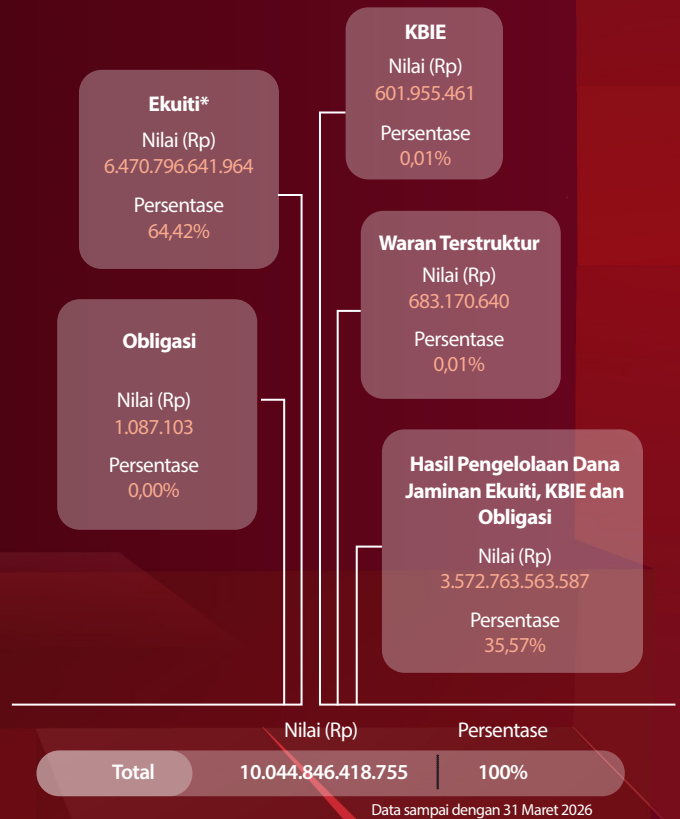
Data sampai dengan 31 Maret 2026

ALTERNATE CASH SETTLEMENT (ACS)

	ACS		Jumlah AK (ACS)	
	Volume	Nilai	AK Serah	AK Terima
Total	21.320.000	82.900.471.625	11	46
Tertinggi	9.928.000	61.313.862.500	2	28
Rata-rata	2.368.889	9.211.163.514	1	5
Terendah	6.300	5.310.000	1	1

Data sampai dengan 31 Maret 2026

POSISI DANA JAMINAN



POSISI CADANGAN JAMINAN

	Nilai (Rp)
Cadangan Jaminan	206.898.834.282

Data sampai dengan 31 Maret 2026

IDClear
 Keep Updated About Us & Follow Our Social Media

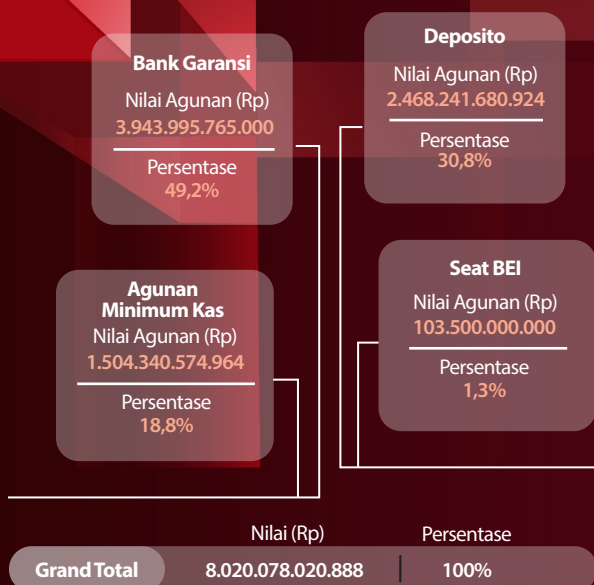
[IDClear-Kliring Penjaminan Efek Indonesia](#)
[kliring penjaminan efek indonesia](#)
[IDClear](#)
[www.idclear.co.id](#)
[id_clear](#)
[@Ask_IDClear](#)
[id_clear](#)

TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM EFEK

	Total			Rata-Rata Harian		
	Nilai	Volume	Frekuensi	Nilai	Volume	Jumlah Hari
Januari	1.250.708.600	978.400	8	40.345.439	31.561	31
Februari	504.470.000	243.600	6	18.016.786	8.700	28
Maret	8.818.768.000	1.414.600	7	284.476.387	45.632	31
April	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-

	Total			Rata-Rata Harian		
	Nilai	Volume	Frekuensi	Nilai	Volume	Jumlah Hari
Agustus	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-
Total	10.573.946.600,00	2.636.600,00	21	117.488.295,56	29.295,56	90

KOMPOSISI AGUNAN OFFLINE

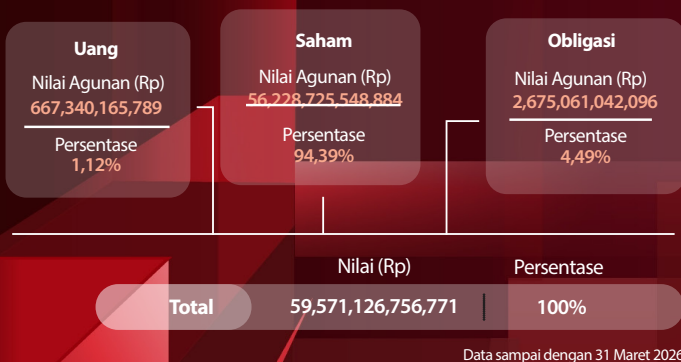


DATA TRANSAKSI TRIPARTY REPO

	Total	
	Nilai	Volume
Januari	Rp0	0
Februari	Rp0	0
Maret	Rp12.500.000.000	117.925.000
April	-	-
Mei	-	-
Juni	-	-
Juli	-	-
Agustus	-	-
September	-	-
Oktober	-	-
November	-	-
Desember	-	-
Total	Rp12.500.000.000	117.925.000

Data sampai dengan 31 Maret 2026

KOMPOSISI AGUNAN ONLINE



TRANSAKSI DERIVATIF

	Frekuensi (kali)	Volume (kontrak)	Nilai (Rp)
LQ 45	0	0	0
IDX 30	0	0	0
SSF	220	1280	505,517,000
Single Stock Futures (Total)	220	1280	505,517,000
Index Futures (Total)	0	0	0
Indonesia Government Bond Futures	0	0	0
Kontrak Berjangka Index Asing (Total)	-	-	-

TRANSAKSI PUVA

	Trades Registered DNDF		Outstanding Position DNDF	
	Frekuensi (kali)	Volume (kontrak)	Frekuensi (kali)	Volume (kontrak)
Total 2026	356	33.248.414.000.000	121	11.642.678.000.000
Tertinggi harian	22	1.848.650.000.000	141	14.839.818.000.000
Rata-rata harian	6	604.516.618.182	83	8.897.018.327.273
Terendah harian	0	0	16	1.740.766.000.000

Data sampai dengan 31 Maret 2026

TRANSAKSI SPPA

	Volume	Frekuensi
Partisipan SPPA	46,743,026,000,000	705

Data sampai dengan 31 Maret 2026

